

UJIAN TENGAH SEMESTER

(UTS)

**TEMA DIGITALISASI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN DARING
DI INDONESIA**



NAMA : AGUS EFFENDI

NPM : 2526061014

PRODI MEGISTER ILMU ADMINISTRASI

KONSENTRASI ADMINISTRASI PUBLIK

MATA KULIAH

KEBIJAKAN PUBLIK DAN APLIKASINYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

ALASAN PEMILIHAN TEORI & ANALISIS IDENTIFIKASI KEBIJAKAN	1
Alasan Pemilihan Teori	1
Identifikasi Kebijakan	1
BAB I. LATAR BELAKANG	2
2.1. Konteks Digitalisasi Pendidikan dan Pembelajaran Daring di Indonesia.....	2
2.2. Masalah Publik dan Tantangan dalam Digitalisasi Pendidikan	3
2.3. Proses Kebijakan Publik di Indonesia: Agenda Setting sebagai Tahap Awal	5
BAB II. FORMULASI KEBIJAKAN	7
2.4. Agenda Setting: Tahapan dan Faktor Penentu	7
2.5. Formulasi Kebijakan: Penyusunan Alternatif, Pilihan Kebijakan dan Pertimbangan Regulasi.....	8
2.6. Implementasi Awal dan Umpan Balik dalam Formulasi Kebijakan (Menuju Pembelajaran Daring)	10
REFERENSI.....	12

ALASAN PEMILIHAN TEORI & ANALISIS IDENTIFIKASI KEBIJAKAN

Alasan Pemilihan Teori

Dalam kerangka kajian kebijakan publik, terutama untuk tema digitalisasi pendidikan dan pembelajaran daring di Indonesia, diperlukan teori yang mampu menjelaskan bagaimana suatu isu naik ke agenda publik/pemerintah (agenda setting), bagaimana kemudian diberi prioritas, lalu dirumuskan kebijakannya (formulasi), dan seterusnya. Oleh karena itu saya memilih teori-proses kebijakan publik (siklus kebijakan) seperti yang dikemukakan Dunn, Anderson, Howlett & Ramesh, serta berbagai model agenda setting (misalnya teori agenda media, teori multiple streams) karena teori-teori ini cocok untuk menganalisis bagaimana digitalisasi pendidikan menjadi “isu” yang kemudian direspons oleh pemerintah Indonesia.

Sebagai tambahan, karena tema digitalisasi pendidikan juga berkaitan dengan transformasi teknologi, literasi digital, kesenjangan akses, maka diperlukan juga teori-yang memandang faktor struktural, aktor kebijakan, jaringan kebijakan (policy networks) dan interaksi aktor publik–swasta. Dengan demikian, proses agenda setting dan formulasi kebijakan menjadi sangat relevan untuk dianalisis memakai pendekatan siklus kebijakan publik.

Identifikasi Kebijakan

Isu kebijakan yang akan dianalisis adalah kebijakan digitalisasi pendidikan dan pembelajaran daring di Indonesia misalnya inisiatif pemerintah untuk memperluas akses pembelajaran daring lewat sekolah digital, program digitalisasi sekolah, dan kebijakan terkait literasi digital. Banyak studi yang menunjukkan digitalisasi menjadi agenda strategis setelah pandemi Covid-19, sebagai respons terhadap geografi Indonesia yang luas, disparitas digital, kebutuhan pembelajaran jarak jauh (Khairatunnisa et al., 2025).

Dengan demikian, siklus kebijakan publik dapat di-aplikasikan: tahap agenda setting (isu digitalisasi pendidikan naik ke perhatian pemerintah) → tahap formulasi (merumuskan program digitalisasi pendidikan) → tahap implementasi dan evaluasi (kelak dilanjutkan). Dalam manuscript ini saya fokus pada dua tahap awal: agenda setting dan formulasi kebijakan.

Teori proses kebijakan publik sangat cocok untuk menganalisis spesifikasi kebijakan ini: karena digitalisasi pendidikan adalah isu kompleks yang melibatkan aktor pemerintah, legislatif, sektor swasta, sekolah, guru, peserta didik, dan infrastruktur teknologi; serta dipengaruhi oleh faktor eksternal (pandemi, globalisasi, SDG). Oleh karena itu saya memilih model siklus kebijakan publik yang memasukkan agenda setting sebagai titik awal kritis, dan kemudian formulasi kebijakan sebagai tahap berikutnya.

BAB I. LATAR BELAKANG

2.1. Konteks Digitalisasi Pendidikan dan Pembelajaran Daring di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan di Indonesia, terutama sejak pandemi Covid-19. Perubahan ini memaksa pemerintah melakukan transformasi digital di sektor pendidikan. Isu digitalisasi pendidikan kemudian naik menjadi agenda kebijakan nasional melalui program *Merdeka Belajar* dan *Digitalisasi Sekolah*. Menurut **Intan Fitri Meutia (2017)**, tahapan awal proses kebijakan publik atau *agenda setting* sangat menentukan arah prioritas pemerintah. Melalui tahapan persepsi, definisi, agregasi, organisasi, dan representasi, isu pendidikan digital dipersepsikan sebagai masalah publik yang harus segera direspons oleh pemerintah.

Dalam pembahasan Konteks Digitalisasi Pendidikan dan Pembelajaran Daring di Indonesia dapat disajikan 5 (lima) Teori yang bisa digunakan dan relevan dalam pembahasan ini:

1. Teori Ilmu Sosial dalam Kebijakan Publik

Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya hasil keputusan politik, tetapi juga merupakan proses sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan perilaku manusia dalam masyarakat. Ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi sosial, ekonomi, dan ilmu politik memberikan dasar untuk memahami bagaimana masyarakat berperilaku, bagaimana kelompok mempengaruhi keputusan, dan bagaimana kebijakan bisa diterima atau ditolak oleh publik. Melalui pendekatan ilmu sosial, kebijakan publik dipandang sebagai hasil interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai aktor sosial lain yang memiliki kepentingan berbeda.

dalam *Analisis Kebijakan Publik* karya Intan Fitri Meutia, Ph.D., didalam buku tersebut menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan bagian dari ilmu sosial terapan yang memadukan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, ekonomi, politik, dan administrasi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa analisis kebijakan publik pada dasarnya adalah penerapan metode ilmu sosial untuk memahami, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalah sosial di lingkungan politik tertentu (Meutia, 2017, hlm. 118–119). Pendekatan ilmu sosial memungkinkan analisis kebijakan untuk melihat kebijakan bukan hanya sebagai keputusan administratif, tetapi sebagai hasil interaksi antara struktur sosial, perilaku manusia, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, teori ilmu sosial membantu menjelaskan bagaimana kebijakan dapat dirancang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta bagaimana dinamika sosial dan politik memengaruhi proses pengambilan keputusan publik (Meutia, 2017)

2. Teori Elite dan Good Governance

Teori ini menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang dijalankan dengan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pemerintah yang menerapkan prinsip *good governance* berarti melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, menjalankan kebijakan secara terbuka, serta bertanggung jawab atas hasilnya. Dalam buku “*Analisis Kebijakan Publik Intan*” Fitri Meutia, konsep *good governance* dikaitkan erat dengan pelaksanaan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan demokrasi. Pemerintah bukan hanya berperan sebagai pengendali, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra masyarakat dalam mencapai tujuan bersama (Meutia, 2017).

3. Teori Peran (Role Theory)

Teori peran berbicara tentang istilah ‘peran’. dalam konteks sosial sebagai fungsi yang dilakukan seseorang ketika memegang posisi dalam struktur sosial.” teori ini menjelaskan peran baru aktor-aktor pendidikan: guru sebagai fasilitator digital, siswa sebagai pembelajar mandiri, dan pemerintah sebagai penyedia kebijakan serta infrastruktur digital. Cocok untuk menganalisis transformasi peran dalam sistem pendidikan digital (Dewi, 2022).

4. Teori Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah, memilih alternatif solusi, dan melaksanakan upaya mengatasi masalah. Teori ini menjelaskan kebijakan digitalisasi pendidikan akan lebih berhasil bila ada partisipasi aktif masyarakat, guru, dan lembaga pendidikan. Teori ini menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi dalam merancang serta mengevaluasi kebijakan digital learning agar sesuai kebutuhan daerah (Dewi, 2022).

5. Teori Rasionalitas (Rational Choice Theory)

Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat melalui pertimbangan logis untuk memilih alternatif paling efisien dalam mencapai tujuan. Pembuat kebijakan dianggap sebagai aktor rasional yang menimbang biaya dan manfaat sebelum mengambil keputusan. Dalam buku *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris* karya, dijelaskan bahwa model rasional menekankan pencapaian sasaran secara efisien dan efektif, di mana kebijakan dikatakan rasional jika mampu memaksimalkan nilai dengan penggunaan sumber daya seoptimal mungkin (Agustina, 2019).

2.2. Masalah Publik dan Tantangan dalam Digitalisasi Pendidikan

Digitalisasi pendidikan di Indonesia menjadi isu publik akibat ketimpangan besar dalam akses infrastruktur dan kemampuan pemanfaatan teknologi antarwilayah. Meski pemerintah telah meluncurkan program seperti *Merdeka Belajar* dan *Platform Rapor Pendidikan*, data BPS dan Kominfo menunjukkan 12–15% sekolah masih kekurangan jaringan internet stabil, sementara banyak sekolah di wilayah 3T belum memiliki perangkat digital memadai. Keterbatasan listrik, biaya kuota internet, serta minimnya perangkat seperti laptop dan tablet memperparah kesenjangan ini, menjadikan digitalisasi pendidikan bukan sekadar isu teknologi, melainkan persoalan keadilan sosial dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa.

Selain masalah infrastruktur, tantangan besar juga muncul dari keterbatasan kompetensi guru dan kesiapan kelembagaan sekolah. Banyak pendidik belum memiliki literasi digital yang cukup untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran interaktif, sementara kurikulum dan sistem evaluasi masih berorientasi pada pola tatap muka tradisional. Regulasi yang belum adaptif dan kebijakan digitalisasi yang sering bersifat proyek membuat implementasinya sporadis dan tidak merata. Karena itu, digitalisasi pendidikan perlu dipandang sebagai agenda publik strategis yang menuntut kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam pembahasan Masalah Publik dan Tantangan dalam Digitalisasi Pendidikan terdapat 5 (lima) Teori yang bisa digunakan dan relevan dalam pembahasan ini:

1. Digital Divide Theory (kesenjangan digital)

Teori Digital Divide menjelaskan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu menciptakan pemerataan akses, tetapi dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok yang memiliki

sumber daya dan keterampilan digital dengan yang tidak. Dalam konteks pendidikan daring di Indonesia, dalam penelitiannya Safira et al. (2024) menyoroti bahwa perbedaan infrastruktur, literasi digital guru dan siswa, serta keterbatasan perangkat di wilayah 3T menyebabkan ketimpangan kualitas pembelajaran dan memperkuat jurang digital antarwilayah. (Safira et al., 2024).

2. Teori Kapabilitas (Amartya Sen) dalam pendidikan

Pendekatan Kapabilitas (Capability Approach) menekankan bahwa tujuan utama pendidikan bukan hanya menyediakan akses atau keterampilan teknis, tetapi memperluas kemampuan nyata (*capabilities*) individu untuk menentukan dan mewujudkan kehidupan yang mereka anggap bernilai. Dalam konteks digitalisasi pendidikan di Indonesia, pendekatan ini relevan untuk menilai sejauh mana pembelajaran daring benar-benar meningkatkan kebebasan substantif siswa dan guru dalam proses belajar-mengajar. Menunjukkan bahwa literasi digital dan efikasi diri guru menjadi faktor penting dalam membentuk kapabilitas pendidik untuk memanfaatkan teknologi secara bermakna. Dengan demikian, digitalisasi pendidikan baru dapat dikatakan berhasil apabila mampu memperluas kesempatan berinovasi dan meningkatkan otonomi belajar, bukan sekadar menyediakan akses terhadap perangkat atau platform digital (Sya'dullah et al., 2024).

3. Teori Kesiapan Organisasi/Institusi (organizational readiness)

Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan adopsi inovasi, termasuk digitalisasi pendidikan, tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan lembaga secara menyeluruh. Kesiapan ini mencakup komitmen terhadap perubahan, keyakinan organisasi untuk beradaptasi, dukungan kepemimpinan, budaya inovatif, serta ketersediaan sumber daya teknis dan manusia. Menurut, tingkat kesiapan organisasi pendidikan sangat menentukan keberlanjutan implementasi pembelajaran daring lembaga dengan dukungan pimpinan yang kuat, kebijakan internal yang jelas, serta pelatihan digital berkelanjutan bagi guru dan dosen lebih mampu mempertahankan praktik pembelajaran berbasis teknologi. Sebaliknya, lembaga dengan kepemimpinan lemah dan sumber daya terbatas cenderung memiliki kesiapan rendah meskipun perangkat tersedia. Oleh karena itu, penilaian kesiapan organisasi perlu mencakup aspek struktural, sumber daya manusia, dan budaya perubahan agar digitalisasi pendidikan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Wagiran et al., 2022).

4. Teori Aktor dan Jaringan Kebijakan (policy network theory)

Teori Jaringan Kebijakan menjelaskan bahwa perubahan kebijakan terjadi melalui pertukaran sumber daya di antara aktor-aktor yang saling bergantung. Dalam konteks ini, kebijakan publik merupakan hasil interaksi antara pemerintah, lembaga, dan pihak terkait yang dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, serta aturan yang berlaku dalam jaringan tersebut. Efektivitas implementasi kebijakan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh koordinasi dan hubungan antaraktor dalam jaringan kebijakan, terutama di tingkat lokal. Karena itu, analisis jaringan kebijakan penting untuk memahami bagaimana kolaborasi dan distribusi kekuasaan memengaruhi keberhasilan perubahan kebijakan publik. (Rulinawaty, 2020).

5. Teori Good Governance dan Kebijakan Publik (governance theory)

Teori *Good Governance* menekankan bahwa kualitas implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam lembaga pendidikan sangat menentukan keberhasilan program digitalisasi, karena lembaga yang menerapkan mekanisme akuntabilitas dan koordinasi antar-aktor secara baik mampu meningkatkan kualitas

layanan pembelajaran daring, sedangkan kelemahan dalam aspek transparansi atau partisipasi menghambat pencapaian tujuan kebijakan (Jamil & Simamora, 2024)

2.3. Proses Kebijakan Publik di Indonesia: Agenda Setting sebagai Tahap Awal

Tahap agenda setting merupakan fase awal yang krusial dalam proses kebijakan publik karena menentukan isu yang menjadi prioritas pemerintah. Pada tahap ini, masalah publik dikenali, diberi perhatian, dan dibawa ke dalam agenda kebijakan melalui peran aktor politik, media, serta tekanan publik. Dalam konteks digitalisasi pendidikan, tahap ini berperan menyoroti kesenjangan akses teknologi, keterbatasan infrastruktur digital, dan rendahnya kesiapan guru sebagai isu strategis yang perlu segera ditangani. Faktor seperti dukungan media, krisis nasional, serta peran kementerian dan lembaga legislatif turut memengaruhi sejauh mana isu digitalisasi pendidikan mendapat perhatian dan diangkat ke tingkat nasional. Melalui agenda setting, pemerintah dapat menilai urgensi isu, mengumpulkan data, serta merancang kebijakan dan regulasi yang relevan, sehingga tahap ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan transformasi digital dalam sistem pendidikan Indonesia..

Dalam pembahasan Proses Kebijakan Publik di Indonesia: Agenda Setting sebagai Tahap Awal, terdapat 5 (lima) Teori yang bisa digunakan dan relevan dalam pembahasan ini:

1. Siklus Kebijakan Publik (policy cycle theory – Anderson, Dunn)

Teori Siklus Kebijakan Publik menjelaskan bahwa proses kebijakan berlangsung melalui tahapan yang saling berhubungan mulai dari identifikasi masalah, perumusan, adopsi, implementasi, hingga evaluasi dan revisi kebijakan. Proses ini bersifat dinamis dan berulang, tidak berjalan secara linier. Menurut Jurnal Media Administrasi (2022), kebijakan publik di Indonesia berkembang melalui tiga tingkatan politik, administrasi, dan operasional yang saling memengaruhi satu sama lain. Sementara itu, Rantung (2024) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan komponen penting dalam siklus, karena menyediakan dasar bagi perbaikan dan keberlanjutan kebijakan. Dengan demikian, teori ini relevan untuk memahami bagaimana kebijakan, termasuk kebijakan digitalisasi pendidikan, perlu melalui proses evaluasi dan umpan balik yang terus-menerus agar tetap efektif dan adaptif terhadap perubahan. (Rantung, 2024)

2. Teori Agenda Setting (Kingdon, Cobb & Elde)

Teori ini dikembangkan oleh Kingdon serta Cobb dan Elder menjelaskan bagaimana sebuah isu bisa menjadi perhatian pemerintah hingga masuk ke dalam agenda kebijakan. Tidak semua masalah publik langsung ditangani; hanya isu yang dianggap penting dan mendapat perhatian politik, media, serta masyarakat yang akhirnya naik ke tingkat agenda kebijakan. Menurut Kingdon, ada tiga aliran yang memengaruhi proses ini, yaitu aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik. Ketika ketiganya bertemu, maka akan terbuka peluang atau *policy window* bagi suatu isu untuk diambil pemerintah sebagai prioritas. Sementara Cobb dan Elder menekankan bahwa penetapan agenda sangat dipengaruhi oleh tekanan publik dan kepentingan aktor-aktor politik. Dalam buku *Analisis Kebijakan Publik* karya Intan Fitri Meutia, teori ini digunakan untuk menggambarkan tahap awal proses kebijakan publik, yaitu bagaimana masalah-masalah sosial diseleksi dan ditentukan menjadi fokus perhatian pemerintah (Meutia, 2017).

3. Teori Multiple Streams Framework (Kingdon)

Teori ini dikemukakan oleh John W. Kingdon menjelaskan bahwa kebijakan publik terbentuk melalui pertemuan tiga arus utama: arus masalah (problem stream), arus kebijakan (policy

stream), dan arus politik (political stream). Ketiganya berjalan terpisah, namun ketika bertemu dalam *policy window*, tercipta peluang untuk perubahan kebijakan. Dalam konteks Indonesia, menunjukkan bahwa interaksi ketiga arus ini berpengaruh besar terhadap proses *agenda setting* dan perumusan kebijakan. (Widyatama, 2018)

4. Teori Advocacy Coalition Framework (ACF)

Teori Advocacy Coalition Framework (ACF) menjelaskan bahwa perubahan kebijakan publik terjadi melalui interaksi antaraktor yang membentuk koalisi berdasarkan kesamaan nilai dan keyakinan. Koalisi ini berupaya memengaruhi kebijakan melalui pertukaran informasi, penggunaan sumber daya, dan strategi advokasi. Dalam konteks Indonesia, Rahardian et al. (2020) menunjukkan bahwa teori ACF efektif untuk menganalisis dinamika kebijakan, seperti pada kasus penolakan izin pengolahan limbah berbahaya di Desa Lakardowo, Jawa Timur, di mana komunitas *Pendowo Bangkit* membentuk koalisi advokasi menggunakan media dan dukungan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan kebijakan sering kali bergantung pada kekuatan interaksi dan strategi koalisi yang memiliki tujuan serta keyakinan bersama (RAHARDIAN et al., 2020)

5. Teori Pemandu Kebijakan (policy windows / policy entrepreneurs)

Teori Pemandu Kebijakan menegaskan bahwa kebijakan publik berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan serta sebagai alat untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Prosesnya melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, legislatif, dan masyarakat melalui tahap penyusunan, implementasi, hingga evaluasi. Menurut Hermanu Iriawan (2019), pemahaman yang mendalam tentang konsep dan jenis kebijakan sangat penting agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan efisien dalam praktik pemerintahan di Indonesia. (Hermanu Iriawan, 2019)

BAB II. FORMULASI KEBIJAKAN

2.4. Agenda Setting: Tahapan dan Faktor Penentu

Menurut **Intan Fitri Meutia, Ph.D.** dalam buku *Analisis Kebijakan Publik*, agenda setting merupakan tahap awal dan paling strategis dalam proses kebijakan publik karena menentukan isu-isu apa yang layak masuk ke dalam perhatian pemerintah. Tahap ini menggambarkan bagaimana suatu masalah sosial dipersepsikan, didefinisikan, dan diperjuangkan agar mendapat tempat dalam agenda kebijakan. Tidak semua persoalan publik otomatis menjadi perhatian pemerintah; hanya isu-isu yang dinilai penting, mendesak, dan memiliki tekanan politik maupun sosial yang cukup kuat yang dapat diangkat menjadi agenda kebijakan (Meutia, 2017).

Proses agenda setting sendiri melalui beberapa tahapan, yakni persepsi, definisi masalah, agregasi, organisasi, dan representasi. Pada tahap persepsi, isu dikenali dan dipahami oleh masyarakat serta pengambil keputusan. Tahap definisi kemudian merumuskan masalah agar jelas dan terarah. Agregasi dan organisasi menjadi wadah untuk menghimpun serta menyalurkan berbagai kepentingan, sedangkan representasi memastikan isu tersebut mendapat perhatian publik luas. Melalui tahapan inilah, isu publik bertransformasi menjadi masalah kebijakan yang siap ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik pada tingkat agenda sistemik (umum) maupun agenda pemerintah (khusus dan konkret)(Meutia, 2017).

Adapun faktor-faktor penentu dalam agenda setting antara lain adalah adanya ancaman terhadap keseimbangan sosial antar kelompok, kepemimpinan politik yang kuat, munculnya krisis atau peristiwa luar biasa, tekanan dari gerakan sosial, dan peran media massa yang membentuk opini publik. Faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan kepentingan aktor politik dan dinamika sistem pemerintahan, sehingga agenda setting menjadi proses politik yang sarat negosiasi dan pertarungan kepentingan. Dengan demikian, tahap ini berfungsi sebagai pintu utama dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan publik yang akan dilaksanakan pemerintah (Meutia, 2017).

Dalam pembahasan Agenda Setting: Tahapan dan Faktor Penentu terdapat 5 (lima) Teori yang bisa digunakan dan relevan dalam pembahasan ini:

1. Teori Agenda Setting

Teori ini menjelaskan bagaimana suatu isu atau masalah dapat naik menjadi perhatian publik dan pemerintah hingga akhirnya masuk ke dalam agenda kebijakan. Menurut Kingdon, proses ini dipengaruhi oleh tiga aliran utama, yaitu *problem stream* (masalah yang muncul dan diakui publik), *policy stream* (alternatif kebijakan yang tersedia), dan *political stream* (situasi dan kekuatan politik yang mendukung). Ketika ketiganya bertemu, terbuka peluang atau *policy window* bagi sebuah isu untuk menjadi agenda pemerintah. Sementara Cobb dan Elder menambahkan bahwa proses penentuan agenda juga dipengaruhi oleh tekanan publik, media, serta aktor-aktor politik yang memiliki kepentingan tertentu.

Dalam buku *Analisis Kebijakan Publik* karya Intan Fitri Meutia, Ph.D., teori ini dijelaskan sebagai tahap awal yang sangat penting dalam proses kebijakan publik, karena menentukan arah serta prioritas pemerintah dalam merespons masalah sosial. Buku ini menegaskan bahwa penentuan agenda kebijakan merupakan proses sosial dan politik yang melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, masyarakat, media, dan kelompok kepentingan. Menurut Meutia, 2017, hlm. 47, agenda setting dipandang sebagai proses strategis di mana isu publik diseleksi menjadi isu kebijakan yang layak untuk ditangani oleh pemerintah (Meutia, 2017).

2. Teori Agenda Building

Teori ini menekankan bahwa pembentukan agenda kebijakan publik melibatkan interaksi antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa media berperan penting dalam membingkai isu dan memengaruhi keputusan pemerintah, seperti pada kasus pengelolaan sampah plastik di Kota Palu. Hal yang sama terjadi pada isu digitalisasi pendidikan, di mana pemberitaan media mengenai kesenjangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran daring mendorong pemerintah menjadikannya agenda kebijakan prioritas. (N. A. A. Putri et al., 2025).

3. Teori Pintu Kebijakan

Menurut Widhiarto (2016), kebijakan publik terbentuk ketika tiga arus—masalah, kebijakan, dan politik—bertemu dalam satu momentum. Dalam kasus Indonesia, pandemi Covid-19 membuka *policy window* yang mendorong pemerintah mempercepat digitalisasi pendidikan melalui kebijakan nasional. Peristiwa besar ini menjadi katalis dalam mempertemukan kebutuhan publik, alternatif solusi, dan dukungan politik. (Widhiarto, 2016).

4. Teori Actor-Network dan Jaringan Kebijakan

Teori ini memberikan perspektif bahwa kebijakan publik terbentuk melalui interaksi dinamis antara aktor manusia dan non-manusia yang terhubung dalam suatu jaringan. Teori ini menekankan bahwa proses kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh aktor formal seperti pemerintah, tetapi juga oleh aktor non-formal serta objek atau teknologi yang memiliki peran dalam membentuk arah kebijakan. Dalam konteks Indonesia, penelitian **Rachman (2023)** tentang revitalisasi pasar di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa interaksi antara pemerintah daerah, pedagang, masyarakat, dan berbagai elemen pendukung membentuk jaringan kebijakan yang kompleks dan saling memengaruhi. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan hasil konstruksi kolektif dari berbagai aktor yang berinteraksi dalam jaringan sosial dan material yang saling terkait (RACHMAN, 2023)

5. Teori Media & Kebijakan Publik (media agenda setting)

Dalam teori ini dijelaskan bahwa media massa memiliki pengaruh besar dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik maupun pembuat kebijakan. Melalui penekanan dan frekuensi pemberitaan terhadap isu tertentu, media mampu membentuk persepsi masyarakat serta mengarahkan perhatian pembuat kebijakan pada isu yang sama. Dalam konteks Indonesia, penelitian **Putri (2022)** menunjukkan bahwa pemberitaan intensif mengenai Omnibus Law berperan dalam membentuk opini publik dan mendorong pemerintah menjadikan isu tersebut sebagai prioritas kebijakan nasional. Temuan ini menegaskan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor aktif yang berperan dalam proses pembentukan agenda dan arah kebijakan publik. (F. Y. Putri, 2022).

2.5. Formulasi Kebijakan: Penyusunan Alternatif, Pilihan Kebijakan dan Pertimbangan Regulasi

Tahap formulasi kebijakan merupakan proses strategis di mana pemerintah dan para pemangku kepentingan merancang kebijakan secara sistematis untuk menjawab masalah yang telah diidentifikasi pada tahap agenda setting. Dalam konteks digitalisasi pendidikan di Indonesia, proses ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesenjangan akses teknologi, literasi digital guru, kesiapan sekolah, serta perbedaan kualitas pendidikan antarwilayah. Pemerintah berkolaborasi dengan kementerian terkait, lembaga pendidikan, pakar teknologi, dan organisasi masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dirancang bersifat inklusif dan sesuai kebutuhan. Alternatif kebijakan

yang disusun meliputi penyediaan infrastruktur digital, pelatihan literasi digital bagi guru, pengembangan platform pembelajaran daring yang mudah diakses, serta pemberian bantuan perangkat bagi siswa kurang mampu.

Pemilihan instrumen kebijakan menjadi tahap penting dalam formulasi, di mana pemerintah dapat menggunakan regulasi, insentif anggaran, program pelatihan, maupun kemitraan dengan sektor swasta. Instrumen tersebut dipilih berdasarkan efektivitas, biaya, dan kemampuan implementasi agar mendorong partisipasi aktif seluruh pihak. Faktor seperti kapasitas kelembagaan, sumber daya, tekanan publik, dan dinamika politik juga turut memengaruhi proses ini. Dengan demikian, formulasi kebijakan digitalisasi pendidikan berperan sebagai fondasi penting bagi keberhasilan implementasi di lapangan, memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya visioner tetapi juga realistis dan berkelanjutan.

Dalam pembahasan Formulasi Kebijakan: Penyusunan Alternatif, Pilihan Kebijakan dan Pertimbangan Regulasi terdapat 5 (lima) Teori yang bisa digunakan dan relevan dalam pembahasan ini:

1. Teori Model Rasional

Teori ini menjelaskan bahwa pembuat kebijakan bertindak secara logis dan sistematis untuk memilih alternatif terbaik dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Proses ini mencakup identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis alternatif, dan pemilihan opsi paling efisien berdasarkan kriteria tertentu. Pramudita dan kawan-kawan menunjukkan penerapan model ini pada kebijakan pembentukan *Laban Central Park* di Kabupaten Gresik, di mana proses pengambilan keputusan mengikuti tahapan rasional dan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan daerah. (Natasya Salsabila Pramudita et al., 2024)

2. Teori Incrementalism

Teori menekankan bahwa proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, bukan melalui perubahan besar yang drastis. Pendekatan ini dianggap realistis karena pembuat kebijakan sering menghadapi keterbatasan informasi, waktu, dan sumber daya. Iskandar dalam tulisan jurnalnya menegaskan bahwa model inkremental relevan diterapkan dalam *policy network*, di mana kolaborasi antaraktor memungkinkan kebijakan dikembangkan secara adaptif, fleksibel, dan berorientasi pada perubahan bertahap sesuai dinamika sosial dan politik. (Iskandar, 2024)

3. Teori Pengambilan Keputusan Publik (public choice)

Teori merupakan cabang dari teori ekonomi yang menganalisis perilaku individu dalam politik dan pemerintahan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Teori ini berasumsi bahwa aktor politik, seperti pejabat publik dan politisi, bertindak berdasarkan kepentingan pribadi layaknya individu di pasar, sehingga keputusan politik sering dipengaruhi oleh upaya memaksimalkan keuntungan pribadi atau kelompok. Arafat (2023) menekankan bahwa pendekatan ini penting untuk memahami potensi penyalahgunaan kekuasaan di sektor publik serta mendorong desain kelembagaan yang lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Arafat, 2023)

4. Teori Governing Capacity & Policy Capacity (kapasitas kebijakan)

Teori ini menyoroti kemampuan pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik secara efektif. kapasitas kebijakan mencakup keterampilan dan sumber daya analitis, operasional, serta politik pada tingkat individu, organisasi, dan sistemik. Sementara itu,

Evangelis Kiahno (2020) menjelaskan bahwa kapasitas tata kelola berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengelola proses kebijakan secara kolaboratif bersama sektor swasta dan masyarakat. Kedua teori ini menekankan pentingnya sinergi antara kompetensi teknis dan koordinasi lintas-aktor untuk menghadapi kompleksitas kebijakan publik yang terus berubah. (Evangelis Kiahno, 2020).

5. Teori Multiple Streams

Teori ini menawarkan perspektif dinamis dalam memahami proses formulasi kebijakan publik. Menurut teori ini, kebijakan publik muncul ketika tiga aliran—masalah, solusi, dan politik—bertemu dalam suatu "jendela kebijakan" (policy window). Aliran masalah mencakup isu-isu yang mendapat perhatian publik; aliran solusi berisi alternatif kebijakan yang tersedia; dan aliran politik melibatkan aktor-aktor politik yang mendukung atau menentang kebijakan tersebut. Ketika ketiga aliran ini bersinggungan, terciptalah kesempatan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan dan mengadopsi kebijakan baru. Teori ini menekankan pentingnya timing dan konteks politik dalam proses formulasi kebijakan (Sholih Muadi et al., 2016)

2.6. Implementasi Awal dan Umpan Balik dalam Formulasi Kebijakan (Menuju Pembelajaran Daring)

Tahap formulasi kebijakan merupakan proses penting ketika pemerintah dan pemangku kepentingan merancang strategi untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi pada tahap agenda setting. Dalam konteks digitalisasi pendidikan di Indonesia, tahap ini mencakup identifikasi kebutuhan seperti kesenjangan akses teknologi, literasi digital guru, dan kesiapan sekolah. Pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga pendidikan, dan pakar, agar kebijakan yang disusun bersifat inklusif dan sesuai kondisi lapangan.

Proses formulasi meliputi penyusunan dan evaluasi berbagai alternatif kebijakan seperti penyediaan infrastruktur digital, pelatihan guru, subsidi perangkat, dan akses internet di wilayah 3T berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian regulasi. Faktor seperti sumber daya, tekanan publik, dan prioritas politik turut memengaruhi keputusan yang diambil. Dengan demikian, tahap ini menjadi fondasi utama bagi keberhasilan implementasi digitalisasi pendidikan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya ideal, tetapi juga realistis dan dapat dijalankan secara efektif.

Dalam pembahasan Implementasi Awal dan Umpan Balik dalam Formulasi Kebijakan (Menuju Pembelajaran Daring) terdapat 5 (lima) Teori yang bisa digunakan dan relevan dalam pembahasan ini:

1. Teori Implementasi Kebijakan (top-down / bottom-up)

Teori ini membedakan dua pendekatan utama, yaitu top-down dan bottom-up, dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Pendekatan top-down berfokus pada peran aktor tingkat atas, seperti pemerintah pusat, dalam menetapkan tujuan dan strategi kebijakan yang harus diikuti oleh pelaksana di lapangan. Sebaliknya, pendekatan bottom-up menekankan peran aktor pelaksana di tingkat bawah, seperti birokrat lokal dan masyarakat, dalam menafsirkan dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan dalam praktiknya, sering kali dikombinasikan untuk mencapai hasil yang optimal dalam implementasi kebijakan publik (Apriani & Indarto, 2018)

2. Teori Feedback dalam Siklus Kebijakan (policy feedback)

Teori ini menjelaskan bahwa hasil dari implementasi kebijakan dapat memberikan umpan balik yang memengaruhi proses pembuatan kebijakan selanjutnya. Dalam konteks kebijakan publik, umpan balik ini dapat berupa informasi mengenai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Sebagai contoh, dalam studi mengenai kebijakan pelayanan publik di Indonesia, ditemukan bahwa umpan balik dari masyarakat terhadap kualitas layanan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan guna meningkatkan kepuasan publik. Hal ini menunjukkan bahwa proses kebijakan bersifat dinamis dan responsif terhadap masukan dari berbagai pihak (Hermanu Iriawan, 2019)

3. Teori Kapasitas Institusional (institutional capacity)

Teori ini menekankan pentingnya kemampuan lembaga publik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan secara efektif. Dalam konteks Indonesia, menurut Saripudin (2025) dalam jurnalnya menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan publik. Studi di Kecamatan Rambutan, Banyuasin, menemukan bahwa rendahnya efektivitas pelayanan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas organisasi. Melalui pelatihan dan penerapan manajemen modern, kapasitas institusional dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya memperbaiki kinerja dan pelayanan publik di tingkat lokal. (Saripudin, 2025)

4. Teori Manajemen Perubahan (organizational change)

Teori ini menjelaskan bagaimana organisasi, termasuk sektor publik, merencanakan dan mengelola transformasi untuk meningkatkan kinerja serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, menurut Huda dan Aslami dalam jurnalnya menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh efektivitas manajemen perubahan. Penelitian mereka mengidentifikasi lima faktor utama yang menentukan keberhasilan, yaitu kepemimpinan transformasional, kesiapan organisasi, komunikasi efektif, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pendekatan perubahan bertahap. Integrasi kelima faktor tersebut membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan keberhasilan proses transformasi dalam organisasi publik. (Huda & Aslami, 2024)

5. Teori Adaptasi Kebijakan (policy adaptation)

Teori ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan pemerintah merespons perubahan lingkungan yang cepat dan tidak terduga. Dalam konteks Indonesia, Qodriyatun et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan adaptif perlu melibatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lokal agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Studi tentang kebijakan adaptasi perubahan iklim melalui *Program Kampung Iklim (ProKlim)* membuktikan efektivitas pendekatan berbasis komunitas dalam meningkatkan ketahanan masyarakat, meskipun masih menghadapi kendala koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya (Qodriyatun et al., 2024).

REFERENSI

- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*.
- Agustina, N. Iaras. (2019). No Title. In *ペインクリニック学会治療指針 2*.
- Apriani, F., & Indarto, K. (2018). *IMPLEMENTASI Kebijakan Publik (Lanjutan)*. September.
- Arafat. (2023). *Buku Referensi Kebijakan Publik*.
- Dewi, D. S. K. (2022). Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi. *UM Jakarta Press*, 268.
- Evangelis Kiahno. (2020). " Analisis Perbaikan Kinerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pasien Corona) dalam Teori Policy Capacity dan Governance Capacity ". January.
- Hermanu Iriawan. (2019). No Title. In *ペインクリニック学会治療指針 2*.
- Huda, V. A., & Aslami, N. (2024). *Manajemen Perubahan Organisasi Publik : Mengatasi Resistensi Perubahan Change Management of Public Organizations : Overcoming Change Resistance*. 22(1), 174–183.
- Iskandar, K. (2024). Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis dalam Sistem Pendidikan. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 11(2), 236–252. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v11i2.1741>
- Jamil, B., & Simamora, B. (2024). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik pada Kantor Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota Application of the Principles of Good Governance in Public Services at Teladan Timur Village Office , Medan City District. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(September), 142–150. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v6i2.4457>
- Khairatunnisa, Suriansyah Ahmad, & Purwanti Ratna. (2025). Analisis Kebijakan Digitalisasi Pendidikan DiIndonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 8, 169–172.
- Natasya Salsabila Pramudita, Safina Rahma Isro'in Maftukha, & Muhammad Noer Falaq Al-Amin. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Menggunakan Teori Model Rasional Mengenai Kebijakan Pembentukan Laban Central Park Oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5). <https://doi.org/10.62281/v2i5.276>
- Putri, F. Y. (2022). Agenda Setting Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Framing Program Tv Mata Najwa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(1), 315–329. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Putri, N. A. A., Riadi, S., & Firmansyah, A. M. (2025). Agenda Setting Pengelolaan Sampah Plastik di Kota Palu. *Journal of Publication Studies*, 02(01), 37–46. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps/article/view/1809>
- Qodriyatun, S. N., Budiman, A., Suryani, A. S., & Yuningsih, R. (2024). Perbandingan Kebijakan Resiliensi dan Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Komunitas di Berbagai Negara. *Foreign Legislation Analysis*, 2(1), 80–98. <https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/fla/FLA-2-1-November-2024-189-9.pdf>

- RACHMAN, A. F. (2023). *MODEL TEORI JARINGAN AKTOR (ACTOR-NETWORK THEORY) DESTINASI WISATA BERBASIS KOPI KULTUR , SINOPSIS DISERTASI* Diajukan pada Sidang Terbuka Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Doktor INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI PROGRAM DOKTOR PARIWI.
- RAHARDIAN, R., WIJAYANTI, R., & MARDIYANTA, A. (2020). Using the Advocacy Coalition Framework To Reject the Environmental Permit for Hazardous and Toxic Waste Processing: Resources and Strategy Used By Community of Lakardowo Village. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(1), 24–42. <https://doi.org/10.18196/jgp.111110>
- Rulinawaty. (2020). *Resources Sharing: Aktor Publik, Jaringan Kebijakan dan Perubahan Kebijakan* (Issue January).
- Safira, S., Purnamika Utami, I. G. A. L., & Arie Suwastini, N. K. (2024). The Immense of Digital Divide: A Literature Review of Rural and Urban Schools's Classroom Technologies in English Language Learning. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(8), 3667–3677. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i8.1306>
- Saripudin, M. H. (2025). *Issn: 3025-9495*. 20(7), 1–8.
- Sholih Muadi, Ahmad Sofwani, & Ismail MH. (2016). Ismail MH. *Jurnal Review Politik*, 06(02), 30.
- Sya'dullah, A., Setyosari, P., Ulfa, S., Praherdhiono, H., & Saroinsong, W. P. (2024). Teaching Style, Digital Literacy, and Self-Efficacy on Early Childhood Education Teacher Capabilities. *Jurnal Pedagogi Dan Pembelajaran*, 7(1), 63–69. <https://doi.org/10.23887/jp2.v7i1.75851>
- Wagiran, W., Suharjana, S., Nurtanto, M., & Mutohhari, F. (2022). Determining the e-learning readiness of higher education students: A study during the COVID-19 pandemic. *Heliyon*, 8(10), e11160. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11160>
- Widhiarto. (2016). Studi Formulasi Kebijakan Kartu Banyumas Sehat Di Kabupaten Banyumas. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 45–58. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v2i1.432>
- Widyatama, B. (2018). Applying Kingdon's Multiple Streams Framework in the Establishment of Law No.13 of 2012 Concerning the Privilege of Yogyakarta Special Region. *Journal of Government and Civil Society*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.643>